

MODEL KLAUSULA PERJANJIAN BAKU YANG BERKEADILAN DALAM SURAT BUKTI KREDIT PADA PT. PEGADAIAN

Anik Firdayati¹,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono, 169 Malang 65145, Telp, (0341) 566505

Email : anikfirdayati@yahoo.com

Abstract

PT. Pegadaian makes an agreement with the borrower when the pawn company decides to make a lending. This agreement, which is made by PT. Pegadaian, shall be acknowledged by customer when the customer borrows money. Such payable-receivable agreement may explain the collateral rate given by the customer to the pawn company as the guarantee that the customer will repay in full rate the principal and interest, and also as the guarantee for repayment of principal and interest in the case of default because the pawn company can put the collateral into auction. Pawn is accessoir agreement while main agreement is loan-borrow agreement with current asset used as collateral, including gold. The provision of pawn is regulated at Civil Code, Book II, Chapter XX, Article 1150-1161. The verification of pawn agreement is similar to the requirement of other agreement, and it is already regulated in Article 1320 of Civil Code. In administering gold collateral, PT. Pegadaian remains pursuant to Article 1977 of Civil Code. However, PT. Pegadaian must apply the principles in cautious manner to accept pawned collateral because the pawn company must track strictly who is the legal owner of the gold. The pawn company must be more specific in making payable-receivable agreement such as by providing a clause in the agreement stating that gold used as the collateral into the pawn company is definitely owned by customer.

Key words: *pawn, collateral, standard agreement of payable-receivable, customer, PT. pegadaian*

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Dalam memberikan pinjaman PT. Pegadaian (persero), melakukan perjanjian dengan peminjam uang (Nasabah). Perjanjian tersebut, dibuat oleh PT. Pegadaian, yang harus ditandatangani oleh nasabah pada saat nasabah meminjam uang. Dalam perjanjian utang piutang berisi mengenai jaminan yang diberikan pihak nasabah kepada pegadaian sebagai jaminan pihak nasabah akan membayar lunas uang pinjaman beserta bunganya yang telah diberikan pihak pegadaian pada nasabah, atau sebagai jaminan pelunasan utang beserta bunga apabila nasabah tidak dapat melunasi utang beserta bunganya, maka pihak pegadaian akan melelang barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah melalui lelang. Gadai merupakan perjanjian aksesoir (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak termasuk juga emas. Ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdara buku II bab XX, pasal 1150-1161. Untuk sahnya perjanjian gadai sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya, yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Mengenai barang jaminan emas PT. Pegadaian berpegang pada pasal 1977 KUHPerdara. Meskipun demikian PT. Pegadaian harus menerapkan Azas kehati-hatian dalam menerima barang jaminan gadai, harus ditelusur secara cermat dan teliti siapa pemilik yang sah dari emas tersebut. Pihak pegadaian dalam membuat perjanjian utang piutang harus lebih spesifik dalam membuat klausul dalam perjanjian supaya emas yang dijadikan barang jaminan yang diterima pegadaian benar-benar milik nasabah.

Kata kunci: gadai, jaminan, perjanjian baku utang piutang, nasabah, PT. pegadaian

Latar Belakang

PT. Pegadaian (persero) dalam memberikan pinjaman melakukan perjanjian dengan peminjam uang (nasabah). Perjanjian tersebut berupa perjanjian utang-piutang yang ada dalam SBK (surat bukti kredit), perjanjian tersebut dibuat secara baku oleh PT. Pegadaian (persero) yang harus disetujui isinya kemudian ditandatangani pihak nasabah sebagai bukti persetujuannya serta menyerahkan barang jaminan yang diserahkan kepada pihak pegadaian. Tanpa menyerahkan benda jaminan nasabah tidak akan mendapat uang pinjaman. Benda jaminan akan tetap pada kekuasaan PT. Pegadaian (persero), selama hutang beserta bunga nasabah belum dilunasi.²

Apabila nasabah tidak melunasi pinjamannya beserta bunga yang telah ditetapkan pihak pegadaian setelah jatuh tempo yang tertulis dalam SBK (surat bukti kredit) yang telah ditandatangani oleh nasabah dan pihak pegadaian, maka PT. Pegadaian (persero) dapat melelang benda yang dijamin dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang nasabah. Pegadaian merupakan pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan yang cepat, wajar dan efisien.

² Wawancara dengan I PGS, pada tanggal 18 mei 2014 pukul 11.00WIB

Menurut Prof. Wiryono Projodikoro SH, gadai adalah sebagai suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.³ Sehingga menimbulkan perikatan, sumber perikatan yaitu: perjanjian dan Undang-Undang.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “Verbinteniss”, perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang lain, hal yang mengikat antara orang yang satu dengan yang lain disebut hubungan hukum⁴.

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Perjanjian gadai termasuk hubungan hukum yang terjadi karena perbuatan. Dan perikatan tersebut, perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, perikatan dalam bidang harta kekayaan disebut perikatan dalam arti sempit. Perikatan dalam bidang harta kekayaan selalu timbul karena perbuatan orang, dan obyek perbuatan itu adalah harta kekayaan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, yang selalu dapat dinilai dengan uang. Jadi ukuran untuk menentukan nilai atau harga kekayaan atau benda itu adalah uang.

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur⁵. Menurut ketentuan pasal 1233 KUHPerdara, perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dan dalam perikatan timbul hak dan kewajiban.

Dalam gadai perikatan yang timbul adalah hak yang diperoleh pihak Pegadaian untuk mendapat pelunasan hutang beserta bunga yang telah ditetapkan dan kewajiban bagi pihak nasabah untuk melunasi hutang beserta bunga yang telah ditetapkan.

Pasal 1234 KUHPerdara, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan dapat dibatasi

³ Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Benda, cetakan ke v, PT Intermasa, Jakarta, 1986, hlm 153.

⁴ Ibid, hal 6

⁵ Ibid, hlm 8.

sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya, yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, jaminan harta kekayaan yang dibatasi disebut jaminan khusus. Artinya jaminan khusus ini hanya mengenai benda tertentu saja, misalnya emas yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur. Jumlah nilai benda tertentu inilah batas tanggung jawab debitur dalam pemenuhan prestasi debitur.⁶

Hukum perikatan diatur dalam buku III KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan umum diatur dalam bab I sampai dengan bab IV buku III (kecuali pasal 152 dan pasal 1353) dan bab V sampai dengan bab XVIII KUHPerdara maupun yang diatur dalam KUHD.

Berlakunya ketentuan-ketentuan umum terhadap hal-hal yang diatur secara khusus itu, dibatasi sepanjang hal-hal itu sudah diatur secara khusus pula. Jika belum diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum berlaku. Hal ini diatur pasal 1319 KUHPerdara dan pasal 1 KUHD.

Pasal 1319 KUHPerdara:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.” perikatan-perikatan yang dilahirkan dalam perjanjian dan bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya.

Pasal 1 KUHD:

“Kitab undang-undang hukum perdata berlaku bagi hal-hal yang dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang.”

Ketentuan-ketentuan umum terhadap hal-hal yang diatur secara khusus “lex specialis derogat legi generali,” artinya ketentuan khusus dimenangkan dari ketentuan umum.

Mengenai suatu hal yang sudah diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum yang mengatur hal yang sama tidak perlu diperlakukan lagi. Jika mengenai suatu hal yang belum diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum yang mengatur hal yang sama, diperlakukan.

Misalnya dalam KUHD sudah diatur secara khusus dan terperinci mengenai perjanjian tertentu, tetapi syarat-syarat sah perjanjian tidak disebutkan, maka berlakulah ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.

perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, sehingga timbul hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini berupa prestasi.

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, CitraAditya Bakti, 1990, hlm.2

Pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi. Prestasi adalah tujuan pihak debitur dan kreditur mengadakan perikatan. Untuk nasabah yang memberikan barang jaminan berupa emas maka apabila nasabah tidak memenuhi prestasinya, atau tidak membayar hutang beserta bunga yang telah ditetapkan pihak Pegadaian atau telah jatuh tempo, maka jaminan berupa emas tersebut dapat dilelang untuk membayar hutang debitur.

Pemberian kredit oleh PT. Pegadaian (persero) kepada nasabahnya, mengenai besar pemberian kredit yang diterima pihak nasabah ditentukan oleh barang jaminan yang diberikan nasabah, barang yang dijadikan jaminan atau gadai harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan, atau disebut barang gadai, barang yang menjadi gadai tersebut harus diserahkan kepada PT Pegadaian (persero), jadi barang yang digadaikan berada dibawah kekuasaan PT. Pegadaian (persero), ini disebut asas *inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai.⁷

Dalam gadai diperlukan adanya dua (2) hal yaitu :

1. Perjanjian gadai : perjanjian gadai adalah persetujuan kehendak yang dinyatakan antara para pihak untuk membebankan hak gadai.
2. Adanya pemberian dalam bezit terhadap benda yang digadaikan kepada penerima gadai, sesuai yang diatur dalam pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara.

Untuk sahnya perjanjian gadai sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya, yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Adanya kata sepakat
2. Adanya kecakapan
3. Adanya hal tertentu
4. Adanya kuasa atau sebab yang halal

Dari ketentuan tersebut dalam perjanjian gadai yang dilakukan antara pemberi dan penerima gadai, harus ada kesepakatan tentang obyek dari gadai tersebut. Jika diantara para pihak sudah sepakat maka perjanjian gadai tersebut akan mengikat para pihak yang bersangkutan.

Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, juga merupakan salah satu syarat yang sangat penting, karena sahnya perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai memiliki kecakapan untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Bila yang bersangkutan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal melakukan perjanjian gadai, maka

⁷ Salim HS, Hukum Perjanjian, Intermasa, 2004, hlm 97.

perjanjian gadai akan batal atau dapat dibatalkan. Sedangkan hal tertentu dalam perjanjian gadai merupakan tujuan yang ingin dicapai. Dalam perjanjian tersebut yaitu berupa pelunasan perjanjian hutang piutang yang dibebani dengan gadai, apabila telah jatuh tempo perjanjian tersebut.

Klausula yang halal dalam hal ini adalah perjanjian hutang piutang yang dibebani gadai tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti benda yang digadaikan harus milik debitur atau dikuasakan pada debitur atau nasabah.

Perjanjian gadai yang harus ditandatangani pihak nasabah adalah bentuk perjanjian baku yang di buat secara sepihak oleh pihak pegadaian dalam membuat klausula perjanjian baku tersebut harus menerapkan azas kehati-hatian dalam menerima barang jaminan gadai, dan harus ditelusur secara cermat dan teliti siapa pemilik yang sah dari barang tersebut. Meskipun PT Pegadaian (persero) mempunyai moto “ menyelesaikan masalah tanpa masalah.”

Berikut ini terdapat beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan pemberian gadai yang berasal dari barang curian atau dari orang yang tidak berhak untuk mengadaikan barang yang dijadikan jaminan di pegadaian.

Contoh kasus pertama : adanya kasus yang ada dikoran Surya, sabtu, 1 Juni 2013, S umur (49) tahun pembantu yang mencuri emas majikannya, dan menurut Kapolsek Blimbing Komisaris polisi (kopol) R, S menjadi korban penipuan lewat pesan singkat (SMS). Suatu hari S mendapat SMS dari nomor tertentu, SMS tersebut berisi pemberitahuan bahwa perempuan asal dusun Bulurejo, desa Saptorenggo, kecamatan Pakis, kabupaten Malang ini mendapat hadiah mobil Toyota Innova. Lewat komunikasi tersebut, penipu meminta S mengirim sejumlah uang sebagai pajak pemenang. Saat itulah S mempunyai pikiran untuk mencuri perhiasan milik majikannya dan digadaikan, setelah berhasil mengadaikan perhiasan yang dicurinya, uangnya langsung ditransfer kepada pelaku penipuan tersebut. Pada hari kamis tanggal 23 Mei 2013 majikan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Blimbing. Pada hari jumat tanggal 24 Mei 2013, polisi menangkap S di wilayah Lawang, kabupate hukum harus menuntut secara perdata kepada terdakwan Malang. Dari penelusuran polisi, perhiasan tersebut diketahui telah digadaikan di pegadaian kecamatan Pakis kabupaten Malang, dan polisi menyita perhiasan tersebut dari pegadaian.

Contoh kasus kedua yang sudah mendapat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan No. 869 K/ pid/ 2013.

Isi dari putusan tersebut adalah :

1. Mengembalikan barang bukti yaitu emas yang telah dicuri kemudian digadaikan tersebut kepemilik yang sah, tidak diberikan pada pegadaian Karangturi selaku penerima gadai.
2. Karena kelalaian pimpinan pegadaian Karangturi yang tidak cermat dalam menerima gadai tanpa memeriksa surat-surat kepemilikan. Untuk menuntut resiko kerugian pihak pegadaian, maka pihak pegadaian Karangturi secara perdata kepada terdakwa.

Supaya barang yang digadaikan pada pihak pegadaian mempunyai fungsi yang semestinya yaitu sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang nasabah pada utang beserta bunganya apabila nasabah tidak mampu membayar hutang beserta bunganya pada saat jatuh tempo maka pihak pegadaian bisa langsung melelang barang yang dijadikan jaminan oleh pihak nasabah. Karena itu pegadaian harus berhati hati dalam menerima barang jaminan dan dalam membuat perjanjian utang piutang atau surat bukti kredit dicantumkan klausul yang membuktikan kepemilikan barang yang di jadikan jaminan tersebut .

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diangkat adalah :

1. Apakah model perjanjian baku di pegadaian menjamin terhadap tuntutan pihak ketiga?
2. Bagaimana format perjanjian yang seharusnya dibuat PT. Pegadaian (persero) dalam menerima gadai emas?

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang diangkat dari tulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerimaan gadai dengan jaminan berupa emas pada PT. Pegadaian (persero)
2. Untuk mengetahui bagaimana format perjanjian baku atau klausul yang perlu ditambahkan oleh pihak pegadaian supaya barang jaminan berupa emas aman baik buat pegadaian dan pihak ke tiga, atau supaya tidak terjadi kasus pegadaian emas dari barang curian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hal yang diteliti merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang sudah ada. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang digunakan karena ada telaah atau analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum tertentu, yakni tentang pegadaian, jaminan, dan perjanjian baku yang dibuat.

Analisis dalam jurnal ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum. Bahan hukum berwujud (a) kata, (b) frase, (c) kalimat, (d) proposisi, (d) dalil, dan (f) prinsip. Fokus utama penelitian hukum mormatif adalah mencari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Dari pencarian ini diperoleh teori hukum, hubungan korelasional antar teori hukum dengan prinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan hukum, dan lain-lain.

Pembahasan

A. Model Perjanjian Baku di Pegadaian dan Mekanisme pelaksanaan gadai dengan barang jaminan berupa emas di PT. Pegadaian (persero).

PT. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai adalah PT. Pegadaian (persero). Memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di lapangan terdapat lembaga keuangan seperti lintah darat dan ijon, yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan mencekik.

Dalam rangka memberikan pinjaman PT Pegadaian (persero) mempunyai prosedur yang relatif sederhana tidak berbelit-belit, waktu yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Misalnya:

Nasabah ketika datang ke PT Pegadaian untuk mengadaikan emas sebagai barang jaminan nasabah harus membawa :

- a. Emas sebagai barang yang akan dijadikan jaminan atas hutang nasabah tersebut
- b. Identitas diri (SIM/KTP) dan fotocopynya.

Nasabah datang ke pegadaian yang buka pada pukul 08.00-14.30, selanjutnya petugas Pegadaian menanyakan maksud dari nasabah apakah mengadaikan barang ataukah akan menebus barang jaminan. Setelah nasabah menjelaskan, bahwa akan mengadaikan emas sebagai jaminan hutangnya, kemudian kita menyerahkan emas yang kita gadaikan,

selanjutnya petugas pegadaian menyerahkan emas tersebut kepada penaksiran harga, untuk menaksir nilai dari emas tersebut supaya pegadaian bisa menentukan berapa uang pinjaman yang bisa diterima nasabah.

Pihak pegadaian memberikan surat bukti kredit (SBK) sebagai bukti nasabah menyetujui ketentuan pegadaian dalam melakukan pinjam-meminjam dengan jaminan barang bergerak berupa emas.

Surat bukti kredit tercantum tanggal kredit, keterangan barang yang kita jadikan jaminan, identitas kita berdasarkan KTP yang telah kita berikan, nilai taksiran dari barang yang kita jadikan jaminan, besar pinjaman, tanda tangan nasabah dan pegawai pegadaian sebagai bukti kalau nasabah menyetujui semua ketentuan pegadaian.

Dalam Surat Bukti Kredit (SBK) tercantum perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai.

Kami yang bertandatangan dibawah Surat Bukti Kredit (SBK) ini, yakni PT Pegadaian (persero) dan nasabah (pemilik barang jaminan atau kuasa dari pemilik barang jaminan), sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:

1. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, tarif sewa modal dan biaya administrasi sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Kredit (SBK) atau nota transaksi (struk) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman.
2. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah dan atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan.
3. Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT Pegadaian (persero) dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di PT Pegadaian (persero), dan biaya proses lelang (jika ada).
4. PT Pegadaian (persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT Pegadaian (persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT Pegadaian (persero).
5. Nasabah dapat melakukan ulang gadai, gadai ulang otomatis, minta tambah uang pinjaman, dan penundaan lelang, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal dan biaya administrasi yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat ulang gadai atau gadai ulang

otomatis, maka nasabah wajib mengangsur uang pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan taksiran yang baru.

6. Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan, besar jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pegadaian (persero) atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang, ulang gadai, atau gadai ulang otomatis, maka PT Pegadaian (persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
8. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, biaya proses lelang(jika ada) dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka pengambilan uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Pegadaian (persero). Jika hasil penjualan lelang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa uang pinjaman, sewa modal, biaya proses lelang (jika ada) dan biaya lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
9. Nasabah dapat datang sendiri untuk melakukan ulang gadai, minta tambah uang pinjaman, mengangsur uang pinjaman, penundaan lelang, pelunasan dan menerima barang jaminan dan menerima uang kelebihan lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP nasabah dan menerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
10. Nasabah atau kuasanya dapat melakukan ulang gadai, mengangsur uang pinjaman, dan pelunasan diseluruh cabang/ unit pegadaian online.
11. Nasabah atau kuasanya harus datang ke kantor cabang atau unit penerbit Surat Bukti Kredit (SBK) untuk minta tambah uang pinjaman, pengambilan barang jaminan, dan pengambilan uang kelebihan lelang.
12. Bilamana nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT Pegadaian (persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris nasabah sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.

13. Nasabah yang menggunakan layanan gadai ulang otomatis membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
14. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian (persero) sepanjang ketentuan yang menyangkut utang piutang dengan jaminan gadai.
15. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Proses gadai:

- a. Bawa emas atau barang yang akan dijadikan jaminan, identitas diri/ KTP dan fotokopynya
- b. Tandatangani Surat Bukti Kredit (SBK)
- c. Serahkan ke loket Penaksir
- d. Tunggu max 15 menit dan ambil uang dikasir
- e. Ingat tanggal jatuh tempo barang yang kita gadaikan, kalau belum ada uang bisa diperpanjang

Dalam penebusan emas yang digadaikan, ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu:

- a. Tarif sewa modalnya 1 % per 300 hari dan maksimal 10 % per 400 hari
- b. Sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan
- c. Jangka waktu kredit maksimal 120 hari atau 4 bulan. Gadai dapat dilunasi atau diperpanjang
- d. Jika sampai pada jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang akan dilelang
- e. Permintaan penundaan lelang dapat dilakukan sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan pegadaian.
- f. Jika surat bukti kredit hilang maka harus segera melapor pada petugas pegadaian.

Proses menebus:

- (1) Proses menebus atas nama sendiri:
 - Serahkan surat bukti kredit (SBK) dan identitas diri ke kasir
 - Bayarlah sesuai dengan bukti penebusan
- (2) Proses menebus tidak atas nama sendiri menebuskan barang jaminan milik orang lain yang telah dikuasakan pada penebus:
 - Surat kuasa yang ditandatangani kedua belah pihak
 - Identitas diri kedua belah pihak

- Menandatangani pengalihan hak (yang ada dibelakang Surat Bukti Kredit [SBK]).
Pegadaian dalam menerima gadai berupa emas , petugas gadai tanpa meneliti apakah barang ini benar milik nasabah misalnya dengan menanyakan nota pembelian, sebagai bukti kepemilikan, petugas pegadaian langsung menaksir emas yang di berikan nasabahnya kemudian memberikan uang pinjaman sebesar nilai emas yang di berikan pihak nasabah sebagai barang jaminannya, mereka mempunyai prinsip siapa yang bawa dialah pemiliknya.

Nasabah atau kuasanya langsung datang ke pegadaian, kemudian petugas pegadaian menaksir nilai dari barang yang kita jadikan sebagai jaminan untuk menentukan jumlah pinjaman yang disetujui atau akan diberikan pegadaian kepada nasabah. Pihak pegadaian meminta kartu identitas atau KTP, dan memberikan surat bukti kredit (SBK) untuk ditandatangani nasabah sebagai bukti persetujuan yang disyaratkan atau ketentuan pegadaian dalam melakukan pinjam-meminjam dengan jaminan barang bergerak (emas) yang diserahkan nasabah pada pegadaian.

Perjanjian yang dibuat secara baku oleh pegadaian dan ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak pegadaian dan nasabah, maka perjanjian tersebut sah seperti ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan itikad baik maka para pihak sepakat mengikatkan diri dan bertanggung jawab pada isi perjanjian tersebut.

Pelaksanaan gadai yang berlangsung di PT Pegadaian (persero) merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata yang merupakan lembaga jaminan dimana objek jaminan berada dalam penguasaan kreditur, kreditur mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Menurut Prof R Subekti, SH, dengan mengacu pada pasal 1150 KUHPerdata gadai adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.⁸ Menurut Prof. Wiryono Projodikoro gadai adalah hak yang didapat kreditur yang didapat dari debitur untuk di bayar lebih dahulu dari penjualan barang itu.⁹

Sesuai dengan PP No. 103 tahun 2000 pasal 8, pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

PP No. 10 tanggal 1 April 1990 tonggak awal kebangkitan pegadaian, untuk mencegah praktek riba.

⁸ Subekti, **pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, cet xxi, 1982 hal.79

⁹ Wiryono Projodikoro, **Hukum Perdata Tentang Hak-hak atas Benda**, Intermasa Jakarta, 1986 hal 153.

KUHPerdata yang menjadi salah satu dari dasar hukum gadai konvensional menentukan perjanjian utang piutang yang terjadi dalam gadai, haruslah merupakan kesepakatan para pihak.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Mengenai kapan terjadinya kata sepakat, KUHPerdata tidak mengaturnya, ada beberapa teori untuk menjawab terjadinya kata sepakat sebagai berikut :

1. Teori kehendak (wilstheorie)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2. Teori kepercayaan (vetrouwenstheorie)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lainnya.

3. Teori ucapan (uitingstheorie)

Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuan terhadap penawaran yang dilakukan kreditur

4. Teori pengiriman (verzenuingstheorie)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika pengiriman dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos.

5. Teori penerimaan (ontvangstheorie)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, karena saat itu kreditur mengetahui kehendak dari debitur.

6. Teori pengetahuan (vernemingstheorie)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima tawaran kreditur¹⁰.

¹⁰ R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 25-26.

Setelah mengetahui waktu terjadinya kata sepakat, maka kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Untuk syahnya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud.

Menurut R. Subekti, sepanjang tidak ada dugaan pernyataan itu keliru, melainkan sepantasnya dapat dianggap melahirkan keinginan orang yang mengeluarkan pernyataan itu maka teori yang dipakai teori kepercayaan (*vetrouwestheorie*).¹¹

Perjanjian utang-piutang yang ada pada surat bukti kredit (SBK) yang dibuat secara baku oleh PT. Pegadaian (*persero*) lahir dari azas kebebasan berkontrak dalam azas ini memberikan kebebasan para pihak untuk mencantumkan sendiri isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian.

Perjanjian utang-piutang pada surat bukti kredit (SBK) merupakan perjanjian baku yang ditentukan isi dan formatnya oleh pegadaian yang bersifat harus disetujui oleh pihak nasabah. Nasabah diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak sama sekali, perjanjian yang diberikan pegadaian.

Dalam surat bukti kredit (SBK) sebagai perjanjian utang-piutang pegadaian tercantum tanggal kredit, keterangan barang yang dijadikan jaminan, identitas nasabah berdasarkan KTP yang diberikan, nilai taksir dari barang jaminan, besar pinjaman, tanda tangan nasabah dan pegawai pegadaian sebagai bukti nasabah menyetujui semua ketentuan pegadaian.

Pada perjanjian utang-piutang pegadaian poin 2 menurut penulis dapat disalah gunakan pihaknasabah yang mempunyai itikad buruk dengan menjaminkan emas hasil curian. Poin 2 yang berbunyi: barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah dan atau kepemilikannya sebagaimana pasal 1977 KUHPerdara dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan.

Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa diketemukan barangnya, dengan tidak mengurangi hak si yang tersebut belakangan untuk minta ganti rugi kepada siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 582 KUHPerdara.

Pasal 582 KUHPerdara berbunyi barang siapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tidak diwajibkan memberi pergantian kepada si yang memegangnya, untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali kebendaan itu

¹¹ Ibid hal. 29

dibelinya dipasar tahunan atau pasar lainnya, dipelelangan umum, atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu.

Prinsip pegadaian yang menganggap emas, siapa yang bawa dia yang punya dan pada model perjanjian baku yang dibuat pegadaian poin 2 mengenai ketentuan barang jaminan tidaklah aman bagi pihak pegadaian terhadap pihak ketiga yang mengaku atau menuntut bahwa barang yang telah diterima pihak pegadaian itu bukan milik nasabah melainkan miliknya terbukti dengan adanya kasus yang menjadi latar belakang.

PT. Pegadaian (persero) dalam hal menerima jaminan emas harus menerapkan azas kehati-hatian dalam menerima barang jaminan gadai, seharusnya ditelusur secara cermat dan diteliti siapa pemilik yang sah dari emas tersebut. Meskipun pegadaian memiliki prinsip mengatasi masalah tanpa masalah tapi tetap harus menerapkan azas kehati-hatian¹². Dalam memberikan kredit dinilai dari:

- a. Character (watak/kepribadian) merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya, untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang, pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi dan jiwa sosial.
- b. Capacity (kemampuan) analisa untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar.
- c. Capital (modal)
Azas Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam.
- d. Condition (kondisi)
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sosial dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang, serta prospek usaha dari sektor yang dikerjakan debitur
- e. Collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu maka jaminan yang dititipkan oleh debitur akan dapat dipergunakan secepat mungkin sebagai pelunasan hutang dengan cara dilelang.

¹² Weston dan Brigham Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Rajawali 2003, hlm 24.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pihak pegadaian harus meneliti keabsahan barang yang dijadikan jaminan oleh pihak nasabahnya karena dalam pegadaian, gadai terjadi pada saat persetujuan kedua belah pihak yakni pihak gadai dan nasabahnya serta penyerahan barang jaminan oleh pihak nasabah. Barang jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak gadai apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

Pertama: pada saat peminjam (nasabah) jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.

Kedua: saat peminjam (nasabah) telah jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Barang jaminan akan dilelang setelah tiga (3) kali dihubungi baik lewat telepon, surat atau sms. Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah baik berupa pinjaman pokok, sewa modal atau bunga dan biaya lelang.

B. Format Perjanjian Baku yang Perlu Ditambahkan PT Pegadaian (Persero) Dalam Menerima Barang Jaminan Emas.

Pada perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai yang ada pada surat bukti kredit (SBK) yang dibuat secara baku oleh pegadaian pada poin 2 dalam perjanjian utang piutang tersebut hanya berisikan “barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan tidak dalam obyek sengketa atau sita jaminan”.

Harusnya pihak pegadaian menerapkan prinsip kehati hatian dalam menerima jaminan emas sehingga dalam perjanjian utang piutang poin 2 harus disertakan pembuktian kepemilikan atas emas tersebut. Mengenai pembuktian diatur pada buku ke empat tentang pembuktian dan daluarsa.

Pasal 1865 KUHPdata : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pasal 1866 KUHPdata alat-alat bukti terdiri atas :

- Bukti tulisan
- Bukti dengan saksi-saksi
- Persangkaan-persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut harusnya poin 2 dalam perjanjian utang piutang tersebut tidak hanya membawa barang jaminan berupa emas akan tetapi juga ditambahkan bukti kepemilikan berupa surat pembelian atas emas yang dijadikan barang jaminan tersebut.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 didalam perundang-undangan tersebut, dimuat ketentuan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, pada pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998.

Mengenai perjanjian utang piutang yang dibuat secara baku oleh pegadaian, perjanjian baku dalam bahasa inggris yakni standar contract, dalam bahasa Belanda standard voorwaarden perjanjian ini dikenal juga dengan istilah take it or live it contract.

Perjanjian baku merupakan bagian dari perjanjian dibawah tangan dan merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian baku menurut Hondius : perjanjian tertulis yang disusun tanpa pembicaraan isinya dan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertentu. Perjanjian baku menurut Darius Badruzaman : perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah “standard contract” kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi konsumen untuk mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku yang meliputi model rumusan,dan ukuran¹³

Model, rumusan dan ukuran tersebut sudah dibakukan dan tidak dapat diganti, diubah atau dibuat lagi karena pengusaha sudah mencetaknyadalam bentuk formulir yang berupa blangko naskah perjanjian perjanjian lengkap atau yang disebut dengan dokumen bukti perjanjian yang memuat tentang syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur. Perjanjian baku adalah perjanjian yang memuat klausa-klausa yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir, perjanjian dibuat oleh para pihak akan tetapi isinya ditentukan oleh salah satu pihak saja.

Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman¹⁴:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditur
- b. Masyarakat (debitur) tidak ikut menentukan isi perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhan debitur
- d. Bentuk tertentu atau tertulis

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 87

¹⁴ H. Salim, perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdara, Raja Grafindo p, 2004 hal 22

- e. Dipersiapkan secara kolektif

Jenis-jenis perjanjian baku :

Menurut Mariam Darul Zaman perjanjian baku dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:¹⁵

- a. Perjanjian standar sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat adalah kreditur dibanding debitur, kedua pihak biasanya terikat dalam organisasi misalnya perjanjian buruh secara kolektif.

- b. Perjanjian baku yang ditentukan pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah misalnya dalam bidang agraria berupa formulir-formulir sebagaimana diatur dalam SK Mentri Dalam Negeri tanggal g Agustus 1977, berupa akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055 dan lain lain.

- c. Perjanjian standar yang ditentukan dilingkungan notaris.

Perjanjian-perjanjian yang sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau dalam bahasa Belanda disebut “contact model”.

Untuk syarat sahnya perjanjian baku sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya, sebagaimana yang diatur pada pasal 1320 KUHPperdata :

- a. Sepakat. Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Mengenai kapan terjadinya kata sepakat, KUHPperdata tidak mengaturnya, ada beberapa teori untuk menjawab terjadinya kata sepakat sebagai berikut:

1. Teori kehendak, dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.
2. Teori kepercayaan, berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak yang lain.

¹⁵ Mariam Daruz Badrulzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung, Alumni, 1994, hal. 47-48

3. Teori ucapan, dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuan terhadap penawaran yang dilakukan kreditur.
 4. Teori pengiriman, dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika pengiriman dilakukan lewat pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel oleh kantor pos.
 5. Teori penerimaan, menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima kemudian membaca surat jawaban dari debitur, karena saat itu kreditur mengetahui kehendak dari debitur.
 6. Teori pengetahuan, menurut teori ini sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima tawaran kreditur.¹⁶
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan
 - c. Satu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Pasal 1332 KUHPdata ditentukan bahwa barang-barang yang bisa dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Menurut ketentuan pasal tersebut dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ketiga ini berakibat batal demi hukum. Perjanjiannya dianggap tidak pernah ada.
 - d. Sebab yang halal, pasal 1335 KUHPdata suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kepentingan umum (pasal 1337 KUHPdata).

Apabila tidak dipenuhi syarat subyektif yaitu sepakat dan cakap maka perjanjian dapat dibatalkan, dan apabila syarat obyektif yaitu satu hal tertentu dan sebab yang halal perjanjian batal demi hukum.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

¹⁶ R.Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 25

dituangkan dalam setiap dokumen perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

UU Perlindungan konsumen UU No.8 Th. 1999 pasal 18 :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini

Ketentuan yang tercantum pada pasal 18 UU Perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pada klausula baku perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai yang ada pada surat bukti kredit (SBK) yang ditetapkan oleh pihak pegadaian pada poin 2 mengenai ketentuan barang yang dijadikan jaminan dengan ketentuan sebagai berikut :

“Barang yang diserahkan adalah milik nasabah dan / atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdta dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan atau sita jaminan.”

Seharusnya pada poin 2 tersebut untuk menjamin kepastian hukum pihak pegadaian akan dilunasi piutang yang telah diberikan pada pihak nasabah dengan barang yang dijadikan jaminan tersebut secara aman. Pihak gadai yang bertindak selaku bezitter atau orang yang menguasai suatu benda jaminan secara fisik, dalam istilah hukumnya disebut inbezitstelling (pasal 1152 KUHPerdta) yang merupakan syarat mutlak dari pemberian jaminan secara gadai. Penerima gadai mengambil alih barang yang digadaikan. Dan apabila nasabah melakukan wanprestasi maka penerima gadai dengan mudah mengeksekusi barang yang digadaikan tanpa harus melalui proses laporan polisi dan penarikan.

Karena itu barang yang dijadikan jaminan harus benar-benar milik nasabah untuk membuktikan emas yang dijadikan jaminan tersebut benar-benar milik nasabah atau nasabah benar-benar orang yang berhak untuk mengadaikan, maka selain berpedoman pada pasal 1977 KUHPerdta untuk membuktikan kepemilikan nasabah maka harus disertakan pula bukti kepemilikan sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdta. Untuk mencegah terjadinya kasus yang terjadi pada latar belakang penulisan tesis, bukti tersebut adalah bukti tulisan berupa nota pembelian untuk emas berupa perhiasan, karena untuk emas batangan dan koin ada sertifikatnya. Dalam poin 2 perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai yang ada dalam surat bukti kredit (SBK) menurut penulis perlu ditambahkan klausul pembuktian pemilik sebagai wujud kehati-hatian pihak gadai terhadap barang yang digadaikan sebagai berikut :

“Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah dan / atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdta dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan tidak dalam objek sengketa dan / atau sita jaminan beserta bukti kepemilikan atas barang jaminan tersebut sebagaimana pasal 1866 KUHPerdta.”

Dengan penambahan klausul tersebut diharapkan dapat mencegah penerimaan barang jaminan yang berasal dari barang curian. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta rasa aman dan terjamin terhadap pihak pegadaian.

PT Pegadaian (persero) dalam menerima jaminan (emas) harus menerapkan prinsip kehati-hatian pasal 1865 KUHPerdara: setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pasal 1866 KUHPerdara alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Mengenai perjanjian utang piutang yang dibuat dibawah tangan dan merupakan perjanjian

tertulis. Hal tersebut didasarkan pada penggolongan berdasarkan bentuknya.

Perjanjian tertulis digolongkan menjadi perjanjian dibawah tangan dan perjanjian dengan akta otentik, perjanjian dibawah tangan digolongkan menjadi perjanjian biasa dan perjanjian standar.

Perjanjian dibawah tangan yang berbentuk biasa adalah : untuk menentukan isi perjanjian, para pihak bernegosiasi karena memiliki posisi yang sama. Perjanjian ini memiliki keunggulan yaitu lebih mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Isi perjanjian adalah hasil musyawarah para pihak, tetapi perjanjian ini memiliki kelemahan dalam lapangan hukum tertentu seperti pada perdagangan, dipandang tidak efektif sehingga dibuat perjanjian baku.

Perjanjian baku menurut Hondius : perjanjian tertulis yang disusun tanpa pembicaraan isinya dan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertentu.

Perjanjian baku menurut Darius Badruzaman: perjanjian yang isinya dibakukan dalam bentuk formulir.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu : standard contract yang artinya tolak ukur yang dipakai

sebagai patokan atau pedoman bagi konsumen untuk mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model rumusan, dan ukuran.¹⁷

Model, rumusan dan ukuran tersebut sudah dibakukan dan tidak dapat diganti, diubah atau dibuat lagi karena pengusaha sudah mencetaknya dalam bentuk formulir yang berupa blangko naskah perjanjian lengkap atau yang disebut dengan bukti perjanjian yang memuat tentang syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang memuat klausula-klausula yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir, perjanjian dibuat oleh para pihak akan tetapi isinya ditentukan salah satu pihak saja.

Perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk perjanjian baku tertulis
- b. Format perjanjian distandarisasi.
- c. Syarat-syarat perjanjian ditentukan pengusaha
- d. Konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak.
- e. Perjanjian baku selalu menguntungkan pengusaha.

Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman ialah¹⁸:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditur
- b. Masyarakat (debitur) tidak ikut menentukan isi perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhan debitur
- d. Bentuk tertentu/ tertulis
- e. Dipersiapkan secara kolektif.

Jenis-jenis perjanjian baku :

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:¹⁹

- a. Perjanjian standar sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat ialah kreditur dibanding debitur, kedua pihak biasanya terikat dalam organisasi misalnya perjanjian buruh secara kolektif.

- b. Perjanjian baku yang ditentukan pemerintah.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 87.

¹⁸ H. Salim, **Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara**, Raja Grafindo p, 2004 hal 22

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung, Alumni, 1994, hal. 47-48.

Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah misalnya dalam bidang agraria berupa formulir-formulir sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/ Dja/ 1977, berupa akta jual beli, model 1156727, akta hipotik 1045055 dan lain-lain.

c. Perjanjian standar yang ditentukan dilingkungan notaris

Perjanjian-perjanjian yang sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *contact model*.

Untuk syarat sahnya perjanjian baku sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya, sebagaimana diatur pada pasal 1320 KUHPerdata:

- a. Sepakat
- b. Cakap
- c. Satu hal tertentu
- d. Sebab yang halal.

Klausula baku pada perjanjian utang piutang pada PT Pegadaian adalah aturan atau ketentuan yang syarat-syaratnya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pegadaian yang dituangkan dalam dokumen perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Akan tetapi klausula baku perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai yang ada pada surat bukti kredit (SBK) yang ditetapkan oleh PT Pegadaian pada poin 2 mengenai ketentuan barang yang dijadikan jaminan dengan ketentuan sebagai berikut : Barang yang diserahkan adalah milik nasabah dan/ atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan atau sita jaminan.

Poin 2 tersebut merupakan jaminan kepastian hukum pihak pegadaian akan dilunasi piutang yang telah diberikan pada nasabah dengan penguasaan barang jaminan yang telah diberikan pihak nasabah pada pegadaian yang bertindak selaku *bezitter* atau yang menguasai secara fisik barang jaminan.

Pada gadai yang bertindak selaku *bezitter* atau orang yang menguasai suatu benda secara fisik adalah kreditur atau pegadaian yang dalam istilah hukumnya disebut *inbezitstelling* (pasal 1152 KUHPerdata) yang merupakan syarat mutlak dari pemberian jaminan secara gadai. Penerima gadai mengambil alih barang yang digadaikan. Apabila debitur atau nasabah melakukan wanprestasi maka penerima gadai dengan mudah mengeksekusi barang yang digadaikan tanpa harus melalui proses laporan polisi dan penarikan. Maka barang yang dijadikan jaminan harus benar-benar milik nasabah, untuk

membuktikan barang yang dijadikan jaminan tersebut benar-benar milik nasabah atau nasabah benar-benar orang yang berhak mengadaikan selain berpedoman pada pasal 1977 KUHPerdara untuk membuktikan kepemilikan disertakan pula bukti kepemilikan sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara.

Kesimpulan

1. PT. Pegadaian (persero) dalam membuat perjanjian utang-piutang yang ada pada surat surat bukti kredit (SBK) yang dibuat secara baku oleh PT. Pegadaian (persero) lahir dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada pegadaian untuk isi dan bentuknya, pada perjanjian utang piutang yang ada SBK dalam ketentuan penerimaan barang jaminan pada poin 2 yang berbunyi barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah dan atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdara dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan tidak menjamin dari tuntutan pihak tiga terbukti dengan adanya kasus yang telah diuraikan pada pendahuluan. Dengan kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya, dengan waktu relatif singkat. Hal ini sesuai moto dari pegadaian yaitu: “ mengatasi masalah tanpa masalah”.

Meskipun demikian pegadaian harus tetap menerapkan azas kehati-hatian dalam menerima barang jaminan gadai. Dan harus ditelusur secara cermat dan teliti siapa pemilik yang sah dari barang tersebut, supaya tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

2. Azas kehati-hatian dalam penerimaan barang jaminan gadai harus benar-benar diterapkan PT. Pegadaian (persero) dengan menambahkan klausul pada perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai pada surat bukti kredit (SBK), pada poin 2
“Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah dan /atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdara dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan dan / atau sita jaminan beserta bukti kepemilikan atas barang jaminan tersebut sebagaimana pasal 1866 KUHPerdara.”

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1990, **Hukum Perikatan**, CitraAdityabakti.

H.Salim, 2004, **Perkembangan Hukum kontrak diluar KUHPerdato**, Raja Grafindo.

Irawan Soerojo, 2006, **Hukum Perjanjian**, Rafika Aditama

Jan Michiel Otto, 2003, **Kepastian Hukum dinegara Berkembang**, Jakarta Komisi Hukum Nasional.

Komariah, 2002, **Hukum Perdata**, UMM Press, Malang

Mariam Daruz Badruzaman, 1994, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung alumni.

Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia** edisi khusus Peradapan.

R. Subekti, **Aneka Perjanjian**, 1992, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, 2004, **Hukum Perjanjian**, hlm.97, Intermasa.

Sidharta, 2006, **Moralitas profesi Hukum**, Rafika Aditama, Bandung.

Weston dan Brigham Kasmir, 2003, **Bank dan Lembaga keuangan lainnya**, Rajawali.

Wiyono Projodikoro, 1986, **Hukum Perdata tentang hak-hak benda**, PT Intermasa cetakan ke v, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 **tentang Kegiatan Utama Pegadaian menyalurkan pinjaman atas dasar Gadai**

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang **Pegadaian mencegah Praktek Riba.**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama Lengkap (dengan gelar) : Anik Firdayati, S.H, M.Kn.

Alamat Rumah : Jl Notojoyo no 385, Tegalgondo

Kecamatan : Karang Ploso Kota : Kabupaten Malang

No. HP : 081233176288

Alamat Email : anikfirdayati@yahoo.com

Judul Tulisan : Model Klausula Perjanjian Baku yang Berkeadilan dalam
Surat Bukti Kredit pada PT. Pegadaian

Lulusan

S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

S2 : Progam Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya Malang

Menyatakan bahwa naskah ini adalah benar-benar karya asli penulis sendiri, tidak ada karya / data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain. Naskah ini belum pernah dimuat dan tidak akan diterbitkan pada jurnal yang lain. Saya bersedia menanggung segala tuntutan jika di kemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan baik secara pribadi maupun tuntutan secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis, dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 September 2014

Hormat saya,

Anik Firdayati, S.H., M.Kn.

**MODEL KLAUSULA PERJANJIAN BAKU YANG BERKEADILAN DALAM
SURAT BUKTI KREDIT PADA PT. PEGADAIAN**

JURNAL



Oleh :

ANIK FIRDAYATI, SH

NIM : 126010200111083

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014